

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan yang menguntungkan semua *stakeholder* adalah kriteria perusahaan dengan kinerja baik. Bukti bahwa perusahaan dapat *sustain* dalam persaingan adalah dengan menciptakan kinerja perusahaan yang tumbuh berkelanjutan (Watson & Head, 2004). Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan diantaranya meminimalisir konflik yang mungkin terjadi. Konflik yang marak terjadi adalah *agency conflict*, yaitu konflik yang timbul antara pemilik, karyawan dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan (Jensen & Meckling 1976 dalam Ghozali 2020). Pada perusahaan yang rawan terjadi *agency conflict* akan menimbulkan kerugian bagi *minority shareholder* dan juga *stakeholder*, bahkan dalam jangka panjang akan mampu menimbulkan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya suatu metode untuk meminimalisir terjadinya *agency conflict*, yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Implementasi tata kelola perusahaan yang baik dalam mengoperasikan perusahaan adalah salah satu kunci sukses untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Penerapan GCG dalam suatu perusahaan mencerminkan adanya pengelolaan yang baik dan transparan, sehingga hal ini akan sangat berdampak positif terhadap *going concern* perusahaan karena adanya peningkatan nilai perusahaan di mata investor dan *stakeholders* lain. Dalam hal implementasi GCG di perusahaan Indonesia

sendiri baru mulai diperhatikan sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggung jawab serta mengabaikan regulasi dengan melakukan praktek-praktek (korupsi, kolusi, dan nepotisme) yang merugikan perusahaan. Merajalelanya kasus korupsi, kolusi, ataupun nepotisme ini sangat bertentangan dengan prinsip tata kelola perusahaan (Effendi, 2016).

Tabel 1.1.
Hasil Survei Kasus *Fraud* di Indonesia Tahun 2019

| Jenis <i>Fraud</i> | Jumlah Kasus | Total Kerugian |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Korupsi | 167 | Rp 373.650.000.000 |
| Penyalahgunaan Aset | 50 | Rp 257.520.000.000 |
| <i>Fraud</i> Laporan Keuangan | 22 | Rp 242.260.000.000 |

Sumber: ACFE, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1. ditemukan bahwa pada tahun 2019 kasus yang banyak terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah kasus korupsi, penyalahgunaan aset, dan *fraud* laporan keuangan. Kasus *fraud* yang terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia tidaklah sedikit, yaitu terdapat 239 kasus pada tahun 2019 yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp 873.430.000.000. Melihat kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih buruknya kualitas tata kelola perusahaan di Indonesia.

Dalam menerapkan GCG sangat diperlukan suatu komitmen yang besar dan tindakan nyata dari manajemen puncak (direksi) dan dewan komisaris sebagai organ utama dalam perusahaan. Sejalan dengan hal yang telah dijabarkan sebelumnya, pada lima tahun terakhir ini terdapat berbagai kasus mengenai lemahnya penerapan GCG yang melibatkan dewan direksi dan komisaris yang

marak terjadi, hal ini menimbulkan pertanyaan atas kapabilitas dewan dalam mengelola dan mengawasi perusahaan. Beberapa diantaranya seperti kasus yang terjadi pada perusahaan asuransi Jiwasraya, tepatnya kasus gagal bayar polis asuransi JS Savings Plan. Kegagalan pembayaran ini disebabkan oleh adanya indikasi *fraud* yang dilakukan oleh dewan Jiwasraya, yang menyebabkan mereka menjadi bias dalam penempatan dana investasi. Jiwasraya sebenarnya telah menunjukkan gejala kesulitan sejak awal tahun 2000, yang disebabkan kapabilitas dewan yang meragukan. Alih-alih memperbaiki kinerja dengan mempertimbangkan saham dengan kinerja baik, dewan membuat keputusan yang strategis dengan memberikan dana promosi kepada klub sepak bola dunia dan beberapa keputusan strategis lainnya (Ulya, 2020). Kasus menarik lainnya yang masih mempertanyakan kapabilitas dewan dalam meningkatkan kinerjanya adalah kasus manipulasi laporan keuangan yang dilakukan salah satu emiten di Indonesia yakni PT. Envy Technologies Indonesia, Tbk (ENVY) dan anak usahanya PT. Ritel Global Solusi (RGS), yang dinilai karena ketidak mampuan fungsi pengawasan yang terjadi di perusahaan (Sandria, 2021).

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dapat dilihat bahwa penerapan tata kelola perusahaan di Indonesia yang masih lemah terutama dalam hal mengelola dan mengawasi perusahaan, maka penelitian ini akan memfokuskan pada organ utama perusahaan yang menjadi kunci dari pembuatan keputusan yang bersifat strategis yang memiliki dampak signifikan terhadap penerapan GCG, yaitu dewan direksi dan dewan komisaris. Dewan direksi adalah perwakilan hukum perseroan yang mempunyai tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan yang

hasilnya harus dipertanggungjawabkan pada saat RUPS, sedangkan dewan komisaris merupakan salah satu organ penting dalam perseroan yang memiliki fungsi pengawasan atas kebijakan manajemen dan memberikan masukan kepada direksi (Ghozali, 2020).

Di samping itu, penelitian ini tidak hanya membahas mengenai sisi demografi (ukuran) dari dewan komisaris dan direksi, namun juga akan dibahas dari sisi kognitif dewan direksi dan komisaris (masa jabatan dan latar belakang pendidikan). Pendorong dari penggunaan variabel masa jabatan dewan direksi adalah karena adanya fenomena semakin lama seseorang menjabat dalam posisi tertentu semakin mendorong terjadinya perilaku *fraud* dan juga mengakibatkan kerugian yang semakin besar bagi perusahaan dan *stakeholders* lain. Sejalan dengan hal tersebut, pada Tabel 1.2. menunjukkan hasil SFI yang dilakukan oleh ACFE (2020) mengenai kasus *fraud* berdasarkan masa jabatan para pelaku *fraud* (direksi, manajer, karyawan, dan lain-lain) dapat dilihat bahwa masa jabatan kurang dari 1 tahun mempunyai kasus yang sedikit dengan kerugian yang diakibatkan kecil, tetapi masa jabatan yang semakin lama menunjukkan kasus *fraud* yang semakin banyak diikuti akibat kerugian yang lebih besar, namun jika dilihat dari masa jabatan yang lebih dari 10 tahun kasus yang terjadi menurun, sehingga hal ini masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut.

Tabel 1.2.
Hasil Survei Kasus *Fraud* Berdasarkan Masa Jabatan Para Pelaku *Fraud*

| <i>Fraud</i> berdasarkan Masa Jabatan | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| Masa Jabatan | Jumlah Kasus | Kerugian yang diakibatkan | |
| | | <1 milyar | 1 milyar - > 10 milyar |
| < 1 tahun | 16 Kasus | 100% | 0% |

| | | | |
|--------------|----------|-------|-------|
| 1 - 5 tahun | 51 Kasus | 84,9% | 15,1% |
| 6 - 10 tahun | 90 Kasus | 82,2% | 17,8% |
| > 10 tahun | 82 Kasus | 88,0% | 12,0% |

Sumber: ACFE, 2020

Dalam struktur dewan komisaris juga diperlukan komisaris independen yang mempunyai kewajiban untuk memantau secara independen atas tindakan manajemen untuk mengurangi masalah *moral hazard* manajer sekaligus berperan untuk memberikan peringatan awal adanya potensi *fraud* yang terjadi di perusahaan (Effendi, 2016). Dewan komisaris selain harus mempunyai sikap yang independensi juga diperlukan pengetahuan yang cukup untuk melakukan pengawasan. Di Indonesia sendiri, persyaratan mengenai latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak diatur secara spesifik. Pengetahuan mengenai keuangan dan bisnis penting untuk dimiliki oleh komisaris, meskipun bukanlah suatu keharusan. Hal ini dikarenakan fungsi komisaris sebagai dewan pengawas (Herlin, 2009). Dewan komisaris yang memiliki pengetahuan dan kompetensi terkait keuangan dan bisnis dinilai memiliki kemampuan yang lebih efektif dalam memberikan masukan dan mengawasi perusahaan karena dapat dilihat bahwa kebanyakan kasus *fraud* di Indonesia, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan *fraud* laporan keuangan sangat berkaitan dengan keuangan perusahaan.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada maka penelitian ini akan memfokuskan pada penggunaan variabel independen tata kelola perusahaan yang dinilai dari sisi demografi dan kognitif dua organ utama perusahaan, yaitu dewan direksi (ukuran dan masa jabatan) serta dewan komisaris (ukuran, komisaris independen, dan latar belakang Pendidikan). Variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu kinerja perusahaan. Tidak seperti penelitian umum di Indonesia, penelitian

ini akan menyediakan pandangan kinerja perusahaan dari dua konsep, yaitu kinerja akuntansi dan kinerja pasar. Selain itu, adanya hasil penelitian terdahulu yang masih tidak konsisten memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini.

Pada penelitian ini sektor manufaktur dipilih sebagai objek penelitian karena industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia didominasi oleh 67% perusahaan keluarga, dimana perusahaan keluarga mempunyai sisi negatif dalam hal masalah nepotisme, manajemen yang konservatif, dan ketidakpercayaan terhadap anggota yang bukan keluarga, sehingga hal ini menyebabkan munculnya *agency conflict* (Ingriyani & Chalid, 2021). Oleh karena itu, sangat perlu diperhatikannya penerapan tata kelola perusahaan di sektor manufaktur ini. Alasan lain penggunaan objek penelitian ini adalah karakteristik dari industri manufaktur, yaitu mempunyai pangsa pasar mayoritas dalam negeri dan merupakan industri yang paling tahan banting terutama dalam keadaan krisis, hal ini menunjukkan kinerja manufaktur akan cenderung lebih stabil daripada industri lain (Sukamulja, 2019). Sejalan dengan pernyataan tersebut juga dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (2020) kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri manufaktur merupakan yang paling besar dibandingkan industri lain, yaitu sebesar 19,8% pada tahun 2020 dan telah terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 19,62%. Terdapatnya peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjadi setelah COVID-19 mulai masuk ke Indonesia ini mencerminkan bahwa kinerja industri manufaktur yang cenderung lebih stabil dan tahan terhadap guncangan yang datang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang.

Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja akuntansi dan kinerja pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
2. Apakah masa jabatan dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja akuntansi dan kinerja pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja akuntansi dan kinerja pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja akuntansi dan kinerja pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
5. Apakah latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja akuntansi dan kinerja pasar pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kinerja akuntansi dan kinerja pasar, secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi, masa jabatan dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris

independen, dan latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan khususnya kinerja akuntansi dan kinerja pasar pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori dan praktik bagi berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Kontribusi Teori

Karya akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan akademik dan pengembangan teori untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap kinerja perusahaan, khususnya kinerja akuntansi dan kinerja pasar. Bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan tema serupa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber referensi.

2. Kontribusi Praktik

Karya akhir ini diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Manfaat lain yang dapat diterima oleh kreditor dan investor dari penelitian ini adalah menambah *awareness* mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam memilih debitor dan perusahaan untuk berinvestasi.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab I ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pada bab II ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka yang mencakupi dasar teori dan penelitian terdahulu untuk mendukung perumusan hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III: Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis dan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, serta analisis data yang mencakupi uji pendahuluan dan uji hipotesis.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab IV ini akan dibahas mengenai deskripsi sampel penelitian, hasil yang diperoleh dari analisis data yang dilakukan serta pembahasan hasil.

BAB V : Penutup

Dalam bab V ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan dan saran.